



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Prabu Gajah Agung No.9 (0261) 201313
Sumedang – 45323

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

Sumedang, 24 April 2024

Nomor : T/2984/70.1.1/IV/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi

di
JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Kami lapor hasil penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2024

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	10.061
	a. Wajib LHKPN	177
	b. Tidak Wajib LHKPN	9.884
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	177
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	8.441
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	1.620
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	1.620

Catatan:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terkendala pemantauan secara memadai dikarenakan tidak ada aplikasi terintegrasi antara KPP Pratama dengan Pemerintah Daerah terkait status pelaporan SPT Tahunan sebagaimana SIHARKA dalam LHKASN;
- ASN yang tidak lapor SPT Tahunan secara umum akibat terkendala NPWP, dan hasil konfirmasi ke KPP Pratama baru dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan pada tahun n+1 (tahun 2025).

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

